

Hubungan Pengawasan Dan Efektivitas Kerja Pertanian Pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur

Indah Winarni¹, Achmad Djumlani², M. Jamal Amin³

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kerja Penyuluh Pertanian dalam pengembangan kelompok tani yang terdapat di wilayah Kabupaten Kutai Timur, yang akan dicoba dikaji hubungannya dengan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 95 responden dan observasi di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan dengan analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) dengan metode Pearson (Product Moment Pearson). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengawasan (X) dan efektivitas kerja Penyuluh Pertanian (Y), dengan koefisien korelasi 0,366. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang tidak terlalu kuat diantara pengawasan dengan efektivitas kerja. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena r positif, berarti semakin tinggi pengawasan maka semakin baik efektivitas kerja Penyuluh Pertanian pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya untuk uji signifikansi koefisien korelasi sederhana (uji t) diketahui nilai signifikasni ($0,01 < 0,05$) H_0 ditolak, artinya bahwa ada hubungan secara signifikan antara pengawasan dengan efektivitas kerja Penyuluh Pertanian. Karena koefisien korelasi nilainya positif, berarti pengawasan berhubungan positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengawasan berhubungan positif terhadap efektivitas kerja Penyuluh Pertanian pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.

Kata Kunci : Penyuluh Pertanian, Pengawasan, Efektivitas Kerja

Pendahuluan

Sejak berlakunya otonomi daerah, penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang menyangkut aspek-aspek perencanaan, kelembagaan, ketenagaan, program, manajemen dan pembiayaan menjadi kewenangan wajib dan tanggungjawab pemerintah Kabupaten / Kota. Sedangkan pemerintah pusat, baik secara langsung maupun melalui Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan pembangunan di bidang pertanian secara produktif, efektif dan efisien sesuai kebutuhan lokal.

-
1. Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
 2. Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda
 3. Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

Selama ini, beberapa metode dalam sistem penyelenggaraan penyuluhan di tingkat Kabupaten / Kota belum berjalan dengan baik dan belum memperlihatkan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dan instansi terkait lainnya seperti institusi penelitian yang merupakan sumber teknologi (litbang pertanian, perguruan tinggi, LSM dan swasta) menyangkut aspek koordinasi sinkronisasi program dan integrasi pelaksanaan program penyuluhan pertanian. Sementara perkembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan petani semakin meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Penelitian ini menempatkan fokus kajian pada peran atau pelaksanaan tugas dari Penyuluh Pertanian yang merupakan pelaku operasional dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, yang seharusnya tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan fungsi pengawasan dari pimpinan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Manullang, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengawasan terhadap kerja penyuluh pertanian di lapangan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan, sekaligus menjawab tantangan bahwa penyuluh pertanian mampu menjadi mitra sejajar dengan pemerintah dan pengusaha serta mampu melaksanakan program pemerintah yang telah direncanakan dengan efektif dan efisien.

Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini serta menetapkan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kerja Penyuluh Pertanian dalam pengembangan kelompok tani yang terdapat di wilayah Kabupaten Kutai Timur, yang akan dicoba dikaji hubungannya dengan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan.

Terkait mengenai efektivitas kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan penyuluhan bagi kelompok tani selama ini, peneliti dapat menjabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Petani masih seringkali merasa dirinya tidak lebih sebagai obyek dalam proyek-proyek pembangunan pertanian, sehingga petani seringkali merasa pelaksanaan program pertanian belum menggambarkan aspirasi petani yang sebenarnya.
2. Petani memiliki harapan untuk dapat lebih berperan dan mengharapkan pemberdayaan penyuluhan dapat menjadikan petani lebih mandiri dalam membangun pertanian dan dirinya selaku produsen atau pelaku agribisnis sektor pertanian.
3. Kemampuan penyuluh seringkali dilemahkan oleh hubungan kerjasama tanpa strategi yang jelas dan fasilitas yang kurang memadai.
4. Masih terbatasnya kewenangan penyuluh untuk memunculkan inisiatif dalam menanggapi situasi pengembangan pertanian di daerah, sementara

penyuluh memiliki tanggungjawab moral yang besar terhadap kemajuan petani dan pembangunan pertanian.

5. Belum terlaksananya misi penyuluhan pertanian berupa pemenuhan kebutuhan petani dan pengembangan kemandirian petani secara efektif.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

“Apakah ada hubungan pengawasan dengan efektivitas kerja penyuluh pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur ?”

Kajian Teori Pengawasan

Menurut Fayol dalam Manullang (1988:136) menjelaskan bahwa Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip yang telah digariskan yang bertujuan untuk menemukan kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulang kembali.

Definisi tersebut menegaskan bahwa batasan pengawasan terletak pada tujuan utama pengawasan itu, yaitu mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Agar tujuan tersebut dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan pengawasan-pengawasan di bidang kunci tertentu, yang menurut Terry dan Rue (1992 : 242) antara lain sebagai berikut : 1). Pengawasan kuantitas. 2). Pengawasan kualitas. 3). Pengawasan waktu. 4). Pengawasan biaya.

Agar pengawasan yang dilakukan seorang atasan bernilai efektif, maka harus terkumpul fakta-fakta mengenai hal yang diawasi. Guna maksud pengawasan semacam itu, Manullang (2012 : 178-180) menemukan beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka pengawasan, yaitu : 1). Interview atau laporan lisan. 2). Laporan tertulis. 3). Laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Efektivitas Kerja

Pengertian efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Gibson dkk (1990 : 27) adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Dengan demikian, efektivitas merupakan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu organisasi.

Dalam analisis efektivitas, diperlukan pemahaman tentang perspektif efektivitas sebagai suatu kesatuan dalam organisasi oleh Gibson dkk (1990 : 29), yang dijabarkan sebagai berikut : 1). Efektivitas individu, merupakan unit analisis yang paling dasar dengan fokus pada kinerja atau tingkat produktivitas orang per orang. 2). Efektivitas kelompok, merupakan jumlah kontribusi efektivitas individu dalam suatu kelompok kerja atau satuan organisasi tertentu. 3). Efektivitas organisasi, merupakan keseluruhan kinerja individu / kelompok yang secara bersamaan dan simultan melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa efektivitas individu, kelompok maupun organisasi saling terkait satu sama lain yang terutama pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh perilaku dari individu sebagai anggota organisasi. Demikian pula terhadap obyek penelitian ini, bahwa efektivitas kerja penyuluh pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab.

Lebih lanjut Etzioni dalam Sihana (2003 : 34) menyatakan guna mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka perlu diimplementasikan fungsi manajemen berupa kontrol atau pengawasan. Efektivitas kelompok fungsional penyuluh pertanian merupakan kumulatif dari efektivitas para penyuluh pertanian secara individual. Dalam mengukur efektivitas kerja seorang penyuluh pertanian, maka perlu diukur melalui indikator terlaksananya program dan rencana kerja penyuluh pertanian yang telah disusun atau ditetapkan, terlaksananya pertemuan kelompok tani, komunikasi dan transfer teknologi, serta peningkatan hasil yang dilaksanakan dan dirasakan para petani

Penyuluh Pertanian

Penyuluhan pertanian sebagai perantara dalam proses alih teknologi merupakan tugas utama dari pelayanan penyuluhan adalah memfasilitasi proses belajar, menyediakan informasi ternologi, informasi input dan harga input-output serta informasi pasar (Badan SDM Pertanian, 2003 : 1).

Dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, penyuluh pertanian dapat berperan sebagai fasilitator dalam membangun hubungan atau keterkaitan antara petani dan pelaku agrobisnis lainnya. Fungsi-fungsi dari semua komponen Sistem Penyuluhan Pertanian itu harus berjalan dan interaksi antar komponen itu juga harus terjadi agar penyuluhan pertanian yang bermutu dapat terjadi secara berkelanjutan (www.margonoipb.files.wordpress.com).

Maka dari itu, lebih lanjut Slamet (2013 : 6) menyatakan bahwa individu penyuluh lapangan memerlukan pengembangan melalui pemberdayaan berupa peningkatan wawasan, keahlian, kesejahteraan, keberpihakan pada petani, fokus pemberdayaan petani, tanggungjawab moral kepada petani, kewenangan untuk berinisiatif dalam menghadapi situasi serta memerlukan sertifikasi tenaga penyuluh pertanian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan pada penyajian data diatas maka selanjutnya penulis akan menganalisis data yang diperoleh untuk melihat hubungan antara pengawasan dengan efektifitas kerja penyuluh pertanian pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.

Adapun analisis data yang digunakan adalah Analisis korelasi sederhana (*Bivariate Correlation*) yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah

hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Untuk itu penulis menggunakan analisis korelasi sederhana dengan metode Pearson atau sering disebut *Product Moment Pearson*. Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y turun).

Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

- 0,00 - 0,199 = sangat rendah
- 0,20 - 0,399 = rendah
- 0,40 - 0,599 = sedang
- 0,60 - 0,799 = kuat
- 0,80 - 1,000 = sangat kuat

Adapun analisis data menggunakan SPSS dan memperoleh hasil analisis korelasi dapat dilihat pada table berikut :

Hubungan

		pengawasan	efektivitas
Pengawasan	Pearson Correlation	1	.336**
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	95	95
Efektivitas	Pearson Correlation	.336**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	95	95

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat hubungan antara pengawasan dan efektivitas kerja (r) adalah 0,366. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang tidak terlalu kuat diantar pengawasan dengan efektivitas kerja. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi pengawasan maka semakin baik efektivitas kerja penyuluh pertanian pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Oleh karena nilai Signifikansi ($0,01 < 0,05$) maka H_0 ditolak, artinya bahwa ada hubungan secara signifikan antara pengawasan dengan efektivitas kerja penyuluh pertanian. Karena koefisien korelasi nilainya positif, berarti pengawasan berhubungan positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja. Jadi dalam penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa Pengawasan berhubungan positif terhadap efektivitas kerja penyuluh pertanian pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengawasan terhadap Penyuluh Pertanian

Dari hasil rekapitulasi variabel pengawasan (X) dengan jumlah 10 pertanyaan dapat diketahui bahwa presentase jawaban responden terbanyak ada pada jawaban (1) setuju yaitu sebesar 60 % yaitu responden mengharapkan pengawasan yang dilakukan harus berdasarkan standart yang objektif dan berorientasi pada peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur termasuk dalam kategori cukup baik. Itu artinya pengawasan pada Badan Penyuluhan belum bisa dikatakan berhasil dan maksimal.

Sedangkan untuk presentase jawaban responden setuju dengan nilai terendah ada pada jawaban (4) yaitu sebanyak 50 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa pengawasan menyebabkan meningkatnya efektivitas kerja untuk itu pengawasan melalui supervisi terhadap penyuluh pertanian dilapangan perlu ditingkatkan frekuensinya dan tidak terbatas pada laporan dari Balai Penyuluhan Kecamatan atau pihak terkait. Selanjutnya supervisi yang dilakukan lebih kepada pembinaan agar penyimpangan dan kesalahan dapat diminimalisir.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Terry dan rue (1992 : 240) mengemukakan bahwa pengawasan harus dihubungkan dengan pola organisasi dan akan membuatnya lebih mudah untuk menugaskan tanggungjawab untuk pengawasan kepada orang-orang yang mengelola kegiatan masing-masing dan memberikan data-data pengawasan yang dapat dipakai kepada manajer yang bersangkutan. Pengawasan juga harus menunjukkan jalan bagi tindakan koreksi, termasuk didalamnya mencaritahu dimana tindakan itu perlu diambil, siapa yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan itu dan tindakan apa yang seharusnya diambil.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka pengawasan terhadap penyuluh pertanian pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur perlu ditingkatkan frekuensinya serta tidak terbatas pada laporan saja. Selanjutnya pemberian reward dan punishment kepada penyuluh pertanian yang memiliki disiplin serta dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya.

Efektivitas Kerja Penyuluh Pertanian

Dari hasil rekapitulasi variabel Efektivitas (Y) dengan jumlah 10 pertanyaan dapat diketahui bahwa presentase jawaban responden terbanyak ada pada jawaban (4) setuju yaitu sebesar 69,5 % yaitu mengenai kemampuan berlaba (prestasi kerja) meliputi penilaian prestasi kerja dilaksanakan dengan baik dan prestasi didukung dengan hubungan yang harmonis antar atasan dan bawahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa

efektivitas kerja penyuluh pertanian yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur termasuk dalam kategori baik.

Sedangkan untuk presentase jawaban responden setuju dengan nilai terendah ada pada jawaban (1) yaitu sebanyak 56 % mengenai penyesuaian diri. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tempat tugas serta karakteristik petani berdampak pada efektivitas kerja sebagai penyuluh pertanian. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penyuluh pertanian tidak bertempat tinggal di Desa tempat bertugas. Sehingga sosialisasi maupun penyesuaian diri pada saat pelaksanaan pekerjaan terkendala. Responden memerlukan waktu lebih untuk memahami karakter dari petani dan kelompok tani binaannya. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan, komunikasi dan transfer teknologi pertanian. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kemampuan menyesuaikan diri penyuluh pertanian perlu mendapat perhatian lebih. Hal ini sejalan dengan pendapat Robbins (1996 : 88) bahwa kesesuaian antara pekerjaan dengan kemampuan pegawai akan dapat meningkatkan persepsi kerja dan motivasi kerja seseorang pegawai, dan akan berpengaruh terhadap efektivitas kerjanya. Efektivitas kerja Penyuluh Pertanian akan merujuk pada perilaku kelompok tani dalam meningkatkan produksi dan pendapatan dari usaha tani.

Hubungan Pengawasan dan Efektivitas Kerja

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat hubungan antara pengawasan dan efektivitas kerja (r) adalah 0,366. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang tidak terlalu kuat antara pengawasan dengan efektivitas kerja. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi pengawasan maka semakin baik efektivitas kerja penyuluh pertanian pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan nilai Signifikansi ($0,01 < 0,05$) maka H_0 ditolak, artinya bahwa ada hubungan secara signifikan antara pengawasan dengan efektivitas kerja penyuluh pertanian. Karena koefisien korelasi nilainya positif, berarti pengawasan berhubungan positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.

Jadi dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengawasan berhubungan positif terhadap efektivitas kerja penyuluh pertanian pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan sebelumnya yang pertama secara keseluruhan, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur terhadap tenaga penyuluh pertanian tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden pada variabel pengawasan yang dijabarkan pada lima indikator dan dari jawaban penyuluh pertanian hasilnya 55 responden menyatakan setuju, selanjutnya 37

responden menyatakan sangat setuju dan sebanyak 3 responden responden menyatakan ragu-ragu. Dengan demikian pengawasan terhadap tenaga penyuluh pertanian dapat meminimalisir penyimpangan serta mampu memberikan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan dari sebuah kebijakan atau program. Selanjutnya secara keseluruhan, efektifitas kerja para penyuluh pertanian dapat dikatakan baik, hal ini didasarkan pada jawaban tentang variabel efektifitas yang mereka berikan dari beberapa butir pernyataan antara lain 64 responden menyatakan efektif, selanjutnya 30 responden menyatakan sangat efektif dan 1 responden menyatakan ragu-ragu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektifitas kerja mereka cukup baik. Efektivitas kerja penyuluh pertanian ditandai dengan terealisasinya berbagai kegiatan yang tertuang dalam program atau rencana kerja penyuluhan melalui pelaksanaan kunjungan dan pertemuan kelompok sebagai upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian. Yang terakhir berdasarkan hasil analisa data diketahui dan terbukti bahwa pengawasan berhubungan positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja penyuluh pertanian. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,336 dengan nilai probabilitas atau nilai signifikansi sebesar 0,001. Koefisien korelasi sebesar 0,336 menunjukkan adanya hubungan yang tidak terlalu kuat antara pengawasan dengan efektifitas kerja penyuluh pertanian pada Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.

Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas maka penulis menyarankan beberapa hal berikut ini; pertama, Badan Penyuluhan Kutai Timur sebagai pihak yang melakukan pengawasan hendaknya dapat meningkatkan kegiatan pengawasannya dengan melaksanakan kegiatan pengawasan secara langsung dan tidak langsung dengan lebih terorganisir melalui adanya jadwal yang sudah tersusun, perumusan tujuan pengawasan dengan jelas, berdiskusi dan bekerjasama dengan para penyuluh pertanian, pengamatan terhadap kegiatan penyuluhan, serta mengadakan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan. Kedua, penyuluh pertanian hendaknya memahami dan menyadari manfaat pengawasan yang dilakukan, yang tujuannya adalah pembinaan untuk meningkatkan efektifitas yang memiliki dampak besar pada hasil kerja penyuluh pertanian. Dengan demikian, harus memanfaatkan hasil dan tindak lanjut pengawasan yang telah dilaksanakan untuk mendorong proses penyuluhan pertanian agar lebih kreatif dan inovatif. Ketiga, pemberian Reward (apresiasi) kepada penyuluh pertanian yang memiliki disiplin kerja serta berdedikasi tinggi sebagai bentuk motivasi dalam melaksanakan penyuluhan. Serta melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. Demikian pula kepada penyuluh pertanian yang tidak aktif diberikan sanksi (Punishment) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang relevan dengan

penelitian ini diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap penelitian ini. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan menambah jumlah sampel dan tidak terkonsentrasi hanya pada Penyuluh Pertanian PNS saja, melakukan pengembangan terhadap variabel penelitian, serta melakukan perbandingan dengan instansi lain.

Daftar Pustaka

- Badan Pengembangan SDM Pertanian. 2003. *Pengembangan Penyuluh Pertanian Nasional*. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Budiman, Arif. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia. Jakarta.
- Gibson, Ivancevic dan Donnelly. 1990. *Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur, Proses*. Terjemahan Djorban Wahid. Erlangga. Jakarta.
- Gibson, Ivancevich, & James, Donnelly. 1996. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Jilid Satu. Terjemahan : Nunuk Ardiani. Jakarta: Bina Aksara.
- Manullang, M. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Cetakan Keduapuluhdua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa : Handyana Pujaatmaka. Edisi Kedelapan. Prenhallindo. Jakarta.
- Slamet, Margono. 2013. *Menata Sistem Penyuluhan Pertanian Menuju Pertanian Modern di Era Otonomi Daerah*. Makalah Seminar Nasional. Institut Pertanian Bogor. Diakses dari www.margonoipb.files.wordpress.com pada 10 Juni 2013.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Kesatu. Alfabeta. Bandung.
- Terry, George R. dan Leslie W. Rue. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Penerjemah : G. A. Ticoalu. Cetakan Ketigabelas. Bumi Aksara. Jakarta.